

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur Negara sipil adalah orang yang diangkat pejabat Negara dan mengikat diri dengan perjanjian untuk bekerja kepada pemerintah yang gajinya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian apartur pemerintahan dapat diartikan sebagai orang yang bekerja kepada pemerintah dan mendapat gaji sesuai dengan undang-undang yang beralaku, serta alat Negara untuk menjalankan pemerintahan.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Pengembangan sangat penting dikarenakan adanya tuntutan pekerjaan sebagai akibat dari era globalisasi yang mengharuskan aparatur pemerintahan memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat. Globalisasi merupakan suatu kenyataan yang memerlukan penanganan tersendiri. Globalisasi mempengaruhi segala sendi kehidupan warga suatu bangsa. Keberadaan era globalisasi ini menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia guna meningkatnya daya guna dan daya saing masyarakat Indonesia.

Menurut Soekidjo Notoatmojo (1992:95) sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek :

- a. Aspek kualitas fisik menyangkut sumber daya manusia yang dikembangkan oleh program-program.
- b. Aspek kualitas non fisik menyangkut mutu sumber daya manusia dan kemampuan baik kecerdasan maupun mentalitas sumber manusia itu sendiri.

Badan Keuangan Aset Daerah sebagai sumber daya manusia memegang peranan penting dalam suatu organisasi atau institusi dalam memajukan gerakan keuangan produktif. Bagaimanapun canggihnya sarana dan prasarana organisasi tersebut tanpa ditunjang kemampuan pengembangan sumber daya manusia yang memadai, maka organisasi tersebut tidak akan maju dan berkembang.

Peneliti memandang bahwa pengembangan sumber daya manusia sangat penting dilaksanakan, sebagai upaya untuk mensukseskan upaya pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Di mana ada wadah yang mengorganisasi (BKAD) yang berupaya menggali potensi karyawan Badan Keuangan Aset Daerah dalam program-program yang ada. Dalam hal ini Sekretaris Badan Keuangan Aset Daerah berusaha untuk meningkatkan pengetahuan karyawan Badan Keuangan Aset Daerah dalam berbagai bidang dan keterampilan dalam melaksanakan tugas fungsinya masing-masing bagian.

Berbicara tentang prestasi yang dimiliki oleh Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bandung sangat membanggakan dan berprestasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Beberapa kali karyawan Badan Keuangan Aset Daerah mendapat penghargaan umroh gratis bagi karyawan yang berprestasi.

Badan Keuangan Aset Daerah yang merupakan Badan yang ada di kompleks Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung memiliki realitas

yang menarik untuk diteliti. Sebuah badan yang berdiri sejak 2018 ini yang dulunya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), pada tahun 2016 berubah menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD) yang kini terpisah menjadi Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD). Hal inilah yang sebenarnya menjadi alasan mengapa peneliti tertarik meneliti pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Badan Keuangan Aset Daerah terkait.

Dalam pengembangan sumber daya manusia Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) untuk keberhasilan suatu organisasi dilakukan Rotasi Kerja (Job Rotation), Hal ini dilakukan untuk menjaga ruang lingkup pekerjaan agar tidak ada kejenuhan. Terkadang para karyawan jenuh Ketika melakukan aktivitas yang dilakukan sehari-hari tanpa ada keterampilan-keterampilan tambahan yang dilakukan pada aktivitas tersebut. Tujuan dari Rotasi Kerja (Job Rotation) untuk meningkatkan motivasi dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta pengalaman kerja, kualitas proses pekerjaan dan produktifitas serta efisiensi organisasi.

Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) selain melakukan rotasi kerja dalam meningkatkan sumber daya manusia mendorong para pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Hal ini disebabkan karena banyaknya para karyawan yang belum optimal dalam melakukan job desk nya sehingga Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) melakukan dorongan kepada setiap karyawan untuk ikut serta dalam Pendidikan dan pelatihan yang sudah dijembatani oleh BKAD. Adanya Pendidikan dan Pelatihan disebabkan adanya kualitas sumber daya manusia yang menurun.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan kebutuhan mendasar dalam pengembangan. Keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas dapat menentukan sukses tidaknya suatu program dari sebuah organisasi seperti badan dan dinas Kabupaten Bandung.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Pengembangan Sumber Daya Aparatur di Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bandung (Studi kasus: Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bandung).

1.2. Fokus Penelitian dan Perumusan Masalah

1.2.1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pengembangan sumber daya aparatur di Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung mengenai program pendidikan dan pelatihan formal di Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian di atas, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan sumber daya aparatur di Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mencari tahu sumber daya aparatur di Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam menerepkan teori-teori yang diperoleh selama menempuh perkuliahan di Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan dan bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik pada umumnya, khususnya mengenai wawasan sumber daya aparatur.

- 2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran mengenai masalah yang berkaitan dengan sumber daya aparatur melalui program pendidikan dan pelatihan formal.